

**TRANSFORMASI RUANG DAN PARTISIPASI *STAKEHOLDERS*:  
MEMAHAMI KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH INDONESIA DALAM PROSES  
REGIONALISME ASEAN PASCA-2003<sup>1</sup>**

***SPACE TRANSFORMATION AND STAKEHOLDERS PARTICIPATION:  
UNDERSTANDING INVOLVEMENTS OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY  
ORGANISATIONS AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POST-  
2003 REGIONALISM IN ASEAN***

**Ahmad Rizky Mardhatillah Umar**

*University of Sheffield, UK*  
Department of Politics, University of Sheffield,  
Elmfield Building, Northumberland Road, Sheffield S10 2TU  
e-mail: armumar1@sheffield.ac.uk

*Abstract*

*This article aims to explain the participation of stakeholders in the making of ASEAN Community after the regional political-economic transformation in 2003. The establishment of ASEAN Community, which is based on three pillars (politics & security, economics, social and cultural) has led to a more complex interactions between actors in the region. Before 2003, ASEAN has been perceived only as an 'international organisation', which is centered around the 'member states' as the only influential actor in the region. Following the establishment of ASEAN Community as a new form of regionalism in 2003, this article argues that the newly-established regional community has opened up spaces for contestations between the state and other new actors in the region, most notably business actors (both big businesses and small-and-medium enterprises) and civil society organisations. Drawn upon the critical perspective, this article argues that emerging interactions between actors in the region has been enabled by the transformation of space structure in ASEAN, that opened up spaces for contestations between stakeholders in the newly-transformed regional organisation. It thus leads to the more complex understanding of regionalism in Southeast Asia. The arguments provided will also be assessed by two case studies on the regionalisation of Human Rights NGOs and Small-and-Medium Enterprises in Indonesia.*

**Keywords:** regionalism, participation, stakeholders, ASEAN community, southeast asia, non-government organisations, small-and-medium enterprises.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari riset kolaboratif *Explaining Stakeholders' Involvement in ASEAN* yang didanai oleh ASEAN Studies Center, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada. (2014) Penulis berterima kasih atas dukungan kerjasama dari Dr Bevaola Kusumasari, Longgina Novadona Bayo, Randy Wirasta Nandyatama, Atin Prabandari, serta atas masukan berharga dari Luqmanul Hakim, Dr AG Subarsono, Dr Hempri Suyatna, serta *reviewer* Jurnal Penelitian Politik. Artikel ini juga tak terlepas dari bantuan *intern* ASEAN Studies Center 2014-2015: Ario Bimo Utomo, Dedi Dinarto, dan Nitia Agustini

## Abstrak

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk 'Masyarakat ASEAN' pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara 'negara' dan aktor-aktor 'non-negara'. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai 'organisasi internasional' yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara negara dan 'pemangku kepentingan'/stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor 'non-negara' dan 'negara' dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah

## Pendahuluan

Perkembangan integrasi di Asia Tenggara pasca-2003 telah memunculkan format regionalisme baru: Komunitas ASEAN. Sejak KTT ASEAN di Bali pada tahun 2003 menyetujui format Komunitas ASEAN yang disepakati untuk dijalankan secara formal pada tahun 2015, kerja sama dan proses integrasi regional di Asia Tenggara telah berkembang dengan cukup pesat. Hal ini dapat terlihat, antara lain, dengan semakin berkembangnya format kelembagaan di tingkat regional dan disepakatinya ASEAN Charter pada tahun 2007. Komunitas ASEAN mentransformasikan format regionalisme di Asia Tenggara dari sekadar 'organisasi regional' menjadi '*regional governance*' yang lebih kompleks dan terlembaga.

Perkembangan tersebut menjadi menarik untuk diulas karena memberikan sesuatu yang tidak dibayangkan sejak pertama kali ASEAN didirikan. Sejak kolonialisme berakhir dan meninggalkan konstruksi negara-bangsa di Asia Tenggara, pembicaraan tentang regionalisme hampir tidak pernah menemui titik temu. Kompleksitas tersebut bukan terjadi tanpa sebab. Rodolfo Severino, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, mencatat bahwa ASEAN lahir dari persilangan berbagai identitas yang sebetulnya *vulnerable* pada berbagai benturan. Secara basis kultural, hampir semua negara di Asia Tenggara adalah negara dengan fondasi etnis dan kultural

yang sangat beragam dan dalam beberapa hal mewarisi sentimen satu sama lain. Lebih kompleks lagi, persilangan identitas tersebut juga terjadi di hampir semua negara. Sebagai contoh, Malaysia, Indonesia, dan Singapura mewarisi basis identitas yang bersilang antara Tionghoa, Melayu, dan beberapa etnis lain yang membuat kepentingan politik luar negeri masing-masing negara di kawasan juga tak lepas dari sentimen identitas.<sup>2</sup>

Persilangan identitas tersebut juga semakin rumit dengan adanya konfigurasi politik luar negeri yang sangat beragam. Filipina sejak Perang Dunia II dikenal sangat dekat dengan kepentingan politik luar negeri AS. Begitu pula Malaysia, Singapura, dengan basis etnisitas yang dominan, punya kedekatan tertentu dengan Cina. Di sisi lain, Indonesia (sebelum 1966) membangun poros dengan Uni Soviet dan Cina. Konfigurasi etnisitas dan politik itu, seperti diakui Thanat Khoman (mantan Menteri Luar Negeri Thailand dan salah seorang Deklarator ASEAN), membuat Asia Tenggara menjadi semacam *theatrum politicum* dari kekuatan-kekuatan besar dunia. Terbukti, beberapa kerangka regional yang dibentuk sebelum 1967 seperti SEATO berakhir

<sup>2</sup> Rodolfo Severino. *ASEAN*. Singapore: ISEAS. Lihat juga Renato Rosaldo. *Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and Belonging in the Hinterlands*. Berkeley and LA: University of California Press.

dengan kegagalan karena dimensi politisnya yang terlalu kentara.<sup>3</sup>

Namun demikian, pada tahun 1967, lima negara di Asia Tenggara bertemu di Bangkok dan mendeklarasikan sebuah organisasi regional bernama ASEAN yang bertahan hingga saat ini. Didirikan diatas kesepakatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil secara keamanan dan sejahtera secara ekonomi, ASEAN menjadi sebuah ‘kanal’ dalam kerja sama kawasan. Hingga tahun 1990an, ASEAN masih diformat sebagai ‘forum’ yang mempertemukan kepala negara dan Menteri Luar Negeri di kawasan. Baru pada tahun 1992, ASEAN memiliki Sekretariat Jendralnya di Jakarta dan menandai proses baru regionalisme. Klimaksnya pada tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat proses integrasi dengan membentuk Masyarakat ASEAN per 31 Desember 2015.

Dengan konfigurasi politik dan kultural yang *vulnerable* tersebut, ada dua pertanyaan yang bisa dimunculkan. *Pertama*, sejauh mana ASEAN bertransformasi secara politis, dari sekadar ‘organisasi regional’ sejak awal mula pembentukannya pada tahun 1967, hingga menjadi Masyarakat ASEAN dengan tiga pilar kelembagaannya pada tahun 2003? *Kedua*, sejauh mana transformasi kelembagaan tersebut kemudian berkontribusi pada relasi *stakeholders* yang kemudian berpartisipasi di ASEAN, baik negara maupun non-negara?

Artikel ini ingin mendiskusikan dua pertanyaan tersebut dengan melacak transformasi gagasan tentang ‘Masyarakat ASEAN’ dan melihat dinamika dan kontestasi antara negara dan aktor-aktor non-negara dalam proses regionalism tersebut. Hal ini penting untuk dibaca karena konstruksi ‘Masyarakat Internasional’ kontemporer pada dasarnya sangat terkait dengan kontestasi-kontestasi politik antara aktor yang ada dalam lanskap politik tersebut.<sup>4</sup> Dengan

<sup>3</sup> Thanat Khoman. “Conception and Evolution”, dalam Kernal S. Sandhu (ed.) *The ASEAN Reader*. Singapore: ISEAS.

<sup>4</sup> Uraian tentang perspektif ‘geopolitik kritis’ dalam memahami ruang, regionalisme, dan hubungan internasional, lihat Richard Ashley. *The geopolitics of geopolitical space: toward a critical social theory of international politics*. *Alternatives*, 12(4), p. 403; Kelly Gerrard. *ASEAN’s engagement of civil Society: Regulating Dissent*. Basingstoke: Palgrave; Andrew Hurrell.

menggunakan teori kritis, regionalisme tidak hanya bisa dilihat dalam konteks negosiasi antara-negara, tetapi juga sebagai ajang ‘kekuatan sosial’ (*social forces*)—meminjam istilah Robert W Cox (1981)— yang ada dalam spektrum kawasan tersebut. Hal ini mengimplikasikan perlunya analisis mengenai keterlibatan *stakeholders* non-negara dalam proses transformasi ‘ruang’ kelembagaan yang terjadi di ASEAN.

Untuk mengelaborasi argumen tersebut, pembahasan artikel ini akan dibagi ke dalam empat bagian besar. Bagian pertama artikel ini akan menjelaskan transformasi ASEAN dari sekadar ‘organisasi internasional’ menjadi ‘masyarakat kawasan’. Berangkat dari transformasi historis tersebut, bagian kedua akan menjelaskan munculnya para *stakeholders* dalam proses regionalisme ASEAN, yang dimungkinkan dari perubahan desain institusional ASEAN pasca-2003. Bagian ketiga akan memberikan penjelasan teoretik untuk menjelaskan kemunculan *stakeholders* di ASEAN pasca-2003, dengan penekanan pada perspektif ‘produksi ruang’ yang ditawarkan oleh Henri Lefebvre. Bagian keempat akan memberikan tinjauan ringkas atas ‘transformasi ruang’ dan ‘keterlibatan stakeholders’ tersebut pada dua kasus, yakni munculnya advokasi kelompok Masyarakat Sipil di isu HAM serta keterlibatan UKM dalam memperluas akses pasarnya di ASEAN.

## **Memahami Keterlibatan Stakeholders di ASEAN: Perspektif Teoretik**

Kajian tentang keterlibatan *stakeholders* non-negara tidak banyak dilakukan dalam konteks regionalisme, terutama regionalisme di Asia Tenggara. Sejauh ini, kajian-kajian yang dilakukan dalam spektrum perspektif realisme, konstruktivisme, atau *English School* lebih banyak menaruh perhatian pada ‘negara’ sebagai aktor utama dan pada gilirannya mengesampingkan aktor non-negara.<sup>5</sup> Pendekatan ini banyak

One world? Many worlds? The place of regions in the study of international society. *International Affairs*, 83(1), 127-146.

<sup>5</sup> Ralf Emmers. *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes In East Asia*. London: Routledge; Jurgen Haacke. *ASEAN’s diplomatic and security culture: origins, development and prospects*. Routledge; Linda Quayle. *Southeast Asia and the*

dikritik oleh liberalisme yang menekankan interdependensi dan kerjasama kawasan, serta teori kritis yang melihat regionalisme sebagai proyek politik dan konsolidasi kapitalisme di tingkat regional.<sup>6</sup>

Umumnya, istilah *stakeholders* digunakan dalam dua *mainstream* kajian: tata kelola perusahaan dan partisipasi warga negara dalam demokrasi.<sup>7</sup> Dalam kajian tata kelola perusahaan, *stakeholder* didefinisikan sebagai orang yang terpengaruh/mempengaruhi bagi pencapaian tujuan perusahaan dan oleh karenanya penting bagi perusahaan.<sup>8</sup> Dalam ranah kajian ini, teori tentang *stakeholder* harus dihubungkan dengan teori lain, yaitu teori ketergantungan sumber daya. Menurutnya, sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk pencapaian tujuannya sangat bergantung pada faktor-faktor yang sifatnya nonteknis. *Stakeholder* menjadi salah satu variabel determinan yang memiliki pengaruh pada perusahaan.

Sementara itu, dalam kajian-kajian tentang demokrasi, *stakeholders* diposisikan sebagai ‘agen’ dalam proses demokratisasi. Konsep tentang *stakeholders* muncul dalam kajian-kajian tentang ‘demokrasi partisipatoris’ atau ‘demokrasi deliberatif’<sup>9</sup>. Kajian Mitra dan Singh di India

melihat bahwa kelompok-kelompok sosial yang saling mengontestasikan dan mengartikulasikan kepentingannya pada dasarnya harus dilihat sebagai *stakeholders* untuk membangun proses politik yang demokratis.<sup>10</sup> Dalam perumusan kebijakan seperti lingkungan, *stakeholders* dipersepsikan sebagai pihak yang harus terlibat dan dimintai pendapat untuk menentukan kebijakan yang ada.<sup>11</sup> *Stakeholders* penting dalam proses demokratis karena setiap keputusan yang diambil harus mengikutsertakan semua kepentingan politik yang saling berkontestasi dalam arena politik yang ada.<sup>12</sup>

Beberapa kajian tersebut pada dasarnya melihat *stakeholders* sebagai ‘agen’ dalam politik demokrasi. Dalam literatur-literatur tentang ‘demokrasi deliberatif’, demokrasi tidak dipahami hanya sebagai ‘aturan main’ dalam proses politik yang ada, melainkan dengan mendorong keterlibatan masyarakat ‘sipil’ dalam perumusan kebijakan yang ada.<sup>13</sup> Artinya, dalam kerangka ini, keterlibatan *stakeholders* esensial dalam proses pembuatan keputusan yang demokratis. Sebagaimana digarisbawahi oleh Jon Elster :

*“Deliberative Democracy rests on argumentation, not only in the sense that it proceeds by argument, but also in the sense that it must be justified by argument. It may not be obvious that arguing is the best way of making collective decisions. All things considered, bargaining or simply votin without prior communication might be superior”*<sup>14</sup>

*in the European Union: Integration through Deliberation?*. London: Routledge; lihat juga Andrew Crane Dirk Matten, dan Jeremy Moon. “Stakeholders as Citizens?”.

<sup>10</sup> SK Mitra & VB Singh, *When rebels become stakeholders*.

<sup>11</sup> Norman Miller, *Environmental Politics: Stakeholders, Interests, and Policy Making*. London and New York: Routledge.

<sup>12</sup> Andrew Crane Dirk Matten, dan Jeremy Moon. “Stakeholders as Citizens?”.

<sup>13</sup> John Gastil dan Peter Levine. *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass; John S Dryzek. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press; Jon Elster. *Deliberative Democracy*. Vol. 1. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

<sup>14</sup> Jon Elster, *Deliberative Democracy*. p. 9.

---

*English School of International Relations: A Region-Theory Dialogue*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

<sup>6</sup> Untuk pendekatan liberal-institusionalis lihat, misalnya, Petri, P. A., Plummer, M. G., & Zhai, F. ASEAN economic community: A general equilibrium analysis. *Asian Economic Journal*, 26(2), 93-118; N. Ganesan, Testing neoliberal institutionalism in Southeast Asia. *International Journal*, 50(4), 779-804. Untuk pendekatan kritis lihat Hameiri, S., & Jayasuriya, K. Regulatory regionalism and the dynamics of territorial politics: The case of the Asia-Pacific region. *Political Studies*, 59(1), 20-37.

<sup>7</sup> Andrew Crane Dirk Matten, dan Jeremy Moon. “Stakeholders as Citizens? Rethinking Rights, Participation, and Democracy”. *Journal of Business Ethics*. Vol. 53. No.1-2; SK Mitra & VB Singh *When rebels become stakeholders: democracy, agency and social change in India*. Sage Publications India;

<sup>8</sup> Edward R Freeman. “The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions.” *Business Ethics Quarterly* Vol. 4. No.4; Jeff Frooman. “Stakeholder Influence Strategies.” *Academy of Management Review*. Vol. 24. No. 2; Freeman, R. Edward, Jeffrey S. Harrison, and Andrew C. Wicks. *Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success*. New Haven: Yale University Press.

<sup>9</sup> Lihat David Held. *Models of Democracy*. London: Polity; Eriksen, Erik Oddvar, and John Erik Fossum (eds). *Democracy*

Dalam konteks “demokrasi deliberatif”, partisipasi *stakeholders* menjadi sangat penting. Partisipasi, menurut perspektif ini, dimaknai dalam bentuk ‘perdebatan’/argumentasi. Demokrasi deliberatif mengisyaratkan adanya ‘rasionalitas’ sebagai dasar dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, untuk memastikan sebuah keputusan demokratis, keterlibatan semua komponen/*stakeholders* dalam proses pembuatan keputusan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat, misalnya, dalam konteks pengambilan kebijakan lingkungan, ketika pelibatan kelompok-kelompok yang terdampak terhadap sebuah fenomena (baik pembangunan maupun industri) akan menentukan seberapa demokratis sebuah kebijakan dibuat.

Kerangka demokrasi deliberatif menjadi sebuah pendekatan yang cukup sering digunakan dalam memahami keterlibatan *stakeholders*. Namun, perspektif ini sebetulnya juga menemui beberapa keterbatasan. *Pertama*, perspektif ini terlalu menekankan ‘rasionalitas’ sebagai pilar utama dalam demokrasi. Sebagaimana ditulis oleh Elster, demokrasi deliberatif membutuhkan ‘argumen’ sebagai kerangka utama dalam mendefinisikan praktik politik.<sup>15</sup> Konsepsi ini, pada praktiknya, tidak hanya terjadi karena publik tidak selalu bersifat rasional. Proponen teori ‘rational choice’ dan para ekonom melihat deliberasi sebagai ancaman terhadap manajemen sumber daya publik, terutama yang terkait dengan kelangkaan.<sup>16</sup> Di sisi lain, rasionalitas yang diandaikan oleh pendekatan ini juga tidak bisa diaplikasikan dalam konteks masyarakat yang lebih luas, karena ‘rasionalitas’ mensyaratkan adanya pengetahuan yang setara di semua lapisan masyarakat. Mengikuti Cass Sunstein, Campbell berargumen bahwa pada kenyataannya, deliberasi hanya dilakukan di tingkat elit dan sangat mengandalkan ‘representasi’ karena rasionalitas mengimplikasikan hanya orang-orang yang punya kecakapan/pengetahuan tertentu yang bisa mengambil keputusan.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, konsepsi rasionalitas membuat perspektif ini terbatas

dalam memahami partisipasi masyarakat dalam satu konteks masyarakat tertentu.

*Kedua*, perspektif demokrasi deliberatif juga meniadakan konflik dan kontestasi yang ada di masyarakat. Di antara kritikus yang cukup terkemuka dalam cara pandang ini adalah Chantal Mouffe. Menurut Mouffe, demokrasi deliberatif justru mereduksi konflik/kontestasi yang ada dalam masyarakat menjadi ‘konsensus’ yang didasarkan pada rasionalitas.<sup>18</sup> Mengutip Wittgenstein, Mouffe mengkritik cara pandang proponen demokrasi deliberatif yang menurutnya terlampaui menghindari konflik. Dalam perspektif deliberatif, rasionalitas publik menentukan keputusan yang diambil. Mouffe melihat cara pandang ini justru mereduksi adanya kontestasi dalam masyarakat yang tidak hanya bertumpu pada rasionalitas, melainkan juga konflik. Menurut Mouffe, cara berpikir yang menghindari konflik dan kontestasi justru merepresi kepentingan-kepentingan kelompok sosial tertentu atas dalih ‘rasionalitas’ dan ‘deliberasi’.<sup>19</sup>

*Ketiga*, cara pandang demokrasi deliberatif ini juga terbatas dalam memahami politik regional. Meskipun dalam beberapa kajian tentang Uni Eropa, perspektif ini muncul sebagai kritik terhadap ‘elitisme’ dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa, perspektif deliberatif juga tidak mampu memberikan penjelasan mengenai bagaimana mengaktifkan kesadaran-kesadaran rasional publik untuk lanskap politik yang lebih besar dari ‘negara-bangsa’.<sup>20</sup> Secara lebih spesifik, dalam konteks ASEAN, cara pandang ini juga kurang mampu menjelaskan bagaimana deliberasi bisa berjalan dalam format regionalisme yang sangat *state-centric* dan tidak banyak memberikan ruang bagi aktor-aktor non-negara. Jika cara pandang ‘deliberasi’ digunakan, kita akan terjebak pada cara pandang yang sangat bertumpu pada ‘negara’ dan melupakan

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> David E. Campbell.. “Social Networks and Political Participation.” *Annual Review of Political Science*. No. 16.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Chantal Mouffe. “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?.” *Social Research* 66 (3): 745-758.

<sup>19</sup> *Ibid.* lihat juga Mouffe, “Democracy in a Multipolar World.” *Millennium-Journal of International Studies*. Vol. 37. No. 3.

<sup>20</sup> Andrew Moravcsik, “Is There a ‘Democratic Deficit’ in World Politics? A Framework for Analysis”. *Government and Opposition*. Vol. 39. No. 2.

fakta penting bahwa ‘negara’ pada dasarnya adalah arena pertemuan dan kontestasi berbagai kepentingan politik.<sup>21</sup>

Selama ini, literatur tentang ASEAN memang didominasi oleh perspektif realis yang sangat percaya dengan ‘negara’ dan ‘perimbangan kekuasaan’ (*balance of power*), sehingga melupakan aktor-aktor di luar negara.<sup>22</sup> Perspektif liberal-institusionalis yang terlalu menitikberatkan pada kapasitas institusi regional sebagai *governance* baru.<sup>23</sup> dan perspektif konstruktivisme yang *concern* pada isu-isu identitas dan norma-norma dalam regionalisme.<sup>24</sup> Saya berargumen bahwa realisme dan konstruktivisme terbatas dalam menjelaskan *stakeholders* karena tendensi *state-centric* mereka. Perspektif realisme berargumen bahwa ASEAN pada dasarnya merupakan hasil dari negosiasi negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun stabilitas kawasan dan menghindari lingkungan mereka dari eksekusi Perang Dingin.<sup>25</sup> Sedikit lebih maju dari realisme, konstruktivisme melihat lingkungan sosial kawasan (interaksi antara negara sebagai ‘agen’ dan politik internasional) sebagai variabel yang mempengaruhi ASEAN.<sup>26</sup> Perspektif ini memang memberikan jawaban yang lebih memuaskan

mengenai terbangunnya Komunitas Kawasan, namun terlampau menekankan pada peran negara dan pemimpinnya dalam diplomasi kawasan. Sementara itu, perspektif liberal-institusionalisme dan konstruktivisme terlalu menekankan kerjasama ‘ekonomi’ dan justru gagal melihat relasi *stakeholders* di ASEAN dengan wacana-wacana politik hegemonik yang beroperasi di ASEAN.<sup>27</sup>

Kelemahan tiga perspektif tersebut, sebagaimana dikritik oleh Kelly Gerrard, adalah *methodological nationalism* yang berasumsi bahwa ‘perilaku negara’ dalam konteks politik regional adalah sebangun dengan relasi antara negara dan warganya.<sup>28</sup> Dengan asumsi itu, *stakeholders* dalam politik regional menjadi terbatas, yaitu negara atau organisasi internasional. Padahal, dalam kurun waktu 1-2 dasawarsa terakhir, muncul berbagai aktor ‘jaringan advokasi transnasional’ atau ‘jaringan pengetahuan transnasional’ yang mulai berupaya mempengaruhi proses regionalisme kawasan.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, perspektif-perspektif ini gagal menyediakan penjelasan pada aktor-aktor non-negara yang sedang tumbuh berkembang di aras regionalisme ASEAN.

Jalan keluar dari kebuntuan dalam kajian-kajian tentang *stakeholders* tersebut ditawarkan oleh perspektif kritis. Dengan menggunakan *framework critical political economy*, kajian Kelly Gerard melihat bahwa keterlibatan *stakeholders* seharusnya dilihat dari konflik dan kontestasi kepentingan antara aktor-aktor sosial yang saling berseteru di ASEAN.<sup>30</sup> Perspektif ini melihat ‘negara’, ‘pasar’, institusi-institusi sosial yang ada didalam satu lanskap politik

<sup>21</sup> JM Hobson, “The Historical Sociology of The State and The State of Historical Sociology in International Relations.” *Review of International Political Economy*. Vol. 5. No.2.

<sup>22</sup> Ralf Emmers. *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes In East Asia*; Michael Leifer. *ASEAN and the Security of Southeast Asia*. London and New York: Routledge.

<sup>23</sup> Mark Beeson. *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and Beyond*. London and New York: Routledge.

<sup>24</sup> Amitav Acharya, *Constructing A Security Community in Southeast Asia*. London and New York: Routledge; Jurgen Rüdland, “The Limits of Democratizing Interest Representation: ASEAN’s Regional Corporatism and Normative Challenges.” *European Journal of International Relations*. No. 20. No.1.

<sup>25</sup> Ralf Emmers. *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes In East Asia*; Michael Leifer. *ASEAN and the Security of Southeast Asia*. London and New York: Routledge.

<sup>26</sup> Amitav Acharya, *Constructing A Security Community in Southeast Asia*. London and New York: Routledge; Jurgen Rüdland, “The Limits of Democratizing Interest Representation: ASEAN’s Regional Corporatism and Normative Challenges.” *European Journal of International Relations*. No. 20. No.1; Hiro Katsumata, “Reconstruction of diplomatic norms in Southeast Asia: The case for strict adherence to the ‘ASEAN Way’.” *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 25(1), p. 104-121.

<sup>27</sup> Luqman-nul Hakim, ASEAN: Konstruksi Regionalisme Ekonomi Asia Tenggara. *Tesis Pascasarjana*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

<sup>28</sup> Kelly Gerrard. *ASEAN’s engagement of civil Society*.

<sup>29</sup> Helen Nesadurai dan Diane Stone, “Southeast Asian Research Institutes and Regional Cooperation”, dalam Diane Stone (ed). *Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development Network*. London: Routledge; Shaun Narine, *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

<sup>30</sup> Gerard, Kelly. 2013. “From the ASEAN People’s Assembly to the ASEAN Civil Society Conference: the Boundaries of Civil Society Advocacy.” *Contemporary Politics*. Vol. 19. No. 4. p. 40-41.

tertentu sebagai sesuatu yang terbentuk secara sosial dan terstruktur melalui pertarungan aktor-aktor sosial yang saling memperebutkan ruang yang ada. Dengan demikian, ASEAN pada dasarnya adalah ‘arena’ yang diperebutkan oleh aktor-aktor pembentuknya – negara, pemain bisnis, kelompok-kelompok NGO, hingga gerakan-gerakan sosial.<sup>31</sup>

Dengan demikian, jika ASEAN dilihat sebagai ‘arena’ tempat kepentingan-kepentingan bertemu di kawasan, penting untuk membedah keberadaan ‘ruang’ di ASEAN serta efektivitas dari advokasi yang dilakukan selama ini secara lebih mendalam. Untuk keperluan tersebut, guna melihat ‘ruang’ dalam perspektif yang lebih holistik, analisis yang dilakukan tidak cukup sekadar melihat arsitektur kelembagaan yang ada, melainkan juga wacana apa yang membentuk arsitektur kelembagaan tersebut dan bagaimana arsitektur kelembagaan yang ada di ASEAN tersebut berevolusi dan melahirkan ruang dalam proses sejarah tersebut. Saya berargumen bahwa konsep ‘produksi ruang’ yang diutarakan oleh Henri Lefebvre akan berguna untuk menjelaskan evolusi ruang sosial yang terdapat di ASEAN. Menurut Lefebvre, setiap interaksi sosial manusia melahirkan ruang yang terbentuk secara dialektis, sehingga, ‘ruang’ adalah produk, dan dibentuk secara diskursif dari wacana-wacana tertentu yang terus direproduksi dalam relasi sosial manusia.<sup>32</sup>

Dalam perspektif ASEAN, penting untuk mengisi *gap* teoretis yang muncul di atas dalam perspektif ruang. Menurut Lefebvre, setiap aparatus politik membentuk dua hal penting: teritorialitas dan ruang. Kendati Lefebvre mengarahkan analisisnya dalam konstruksi ‘politik nasional’, dengan terbentuknya konstruksi Komunitas ASEAN, konsep-konsep teritorialitas dan ruang tersebut juga perlu dipahami dalam konteks politik regionalisme yang sedang berlangsung. Lefebvre melihat bahwa ‘negara’ terbentuk dari munculnya ‘teritori; yang bersifat fisik. Dari ‘ruang fisik’ tersebut, ia berevolusi menjadi ‘ruang-ruang sosial’ yang di dalamnya muncul aturan-aturan hukum, bahasa, hingga

<sup>31</sup> *Ibid.* p. 41.

<sup>32</sup> Lihat Henri Lefebvre, *Henri Lefebvre: key writings*. Bloomsbury Publishing.

institusi. Ruang sosial tersebut kemudian bertransformasi menjadi ‘ruang mental’ setelah ada pembentukan identitas bersama yang ada di dalamnya.<sup>33</sup>

Menurut Lefebvre, ‘ruang’ tersebut dibentuk dari artikulasi-artikulasi politik aktor yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, penting untuk memahami munculnya ‘ruang’ di dalam sebuah arena politik (dalam konteks ini, ASEAN) dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan siapa yang bermain dalam arena tersebut. Artinya, ‘ruang’ tidak hanya dipahami hanya dibentuk oleh aparatus kekuasaan tertentu (seperti negara) atau terbentuk dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari negosiasi dan konflik antara aktor-aktor yang ada di dalamnya. Pada titik itulah ‘ruang’ dipahami sebagai sesuatu yang diproduksi dan bukan serta-merta ada.<sup>34</sup> Perspektif ‘produksi ruang’ yang ditawarkan dalam artikel ini untuk menjelaskan keterlibatan *stakeholders* di ASEAN akan memberikan perspektif dan cara pandang yang lebih relevan untuk menjelaskan dinamika regionalisme di ASEAN saat ini, khususnya dalam hal keterlibatan aktor-aktor non-negara.

Secara teoretik, konsep ‘produksi ruang’ yang dibaca dalam perspektif kritis akan membantu kajian ini dalam memahami relasi antara ‘struktur’ dan ‘agen’ dalam pembangunan ruang-ruang keterlibatan *stakeholders* dalam proses regionalisme di ASEAN. Mengikuti logika realisme kritis tentang debat ‘struktur-agensi’, artikel ini melihat ASEAN sebagai struktur yang didefinisikan oleh agensi-agensinya di dalamnya. Berbeda dengan argumen konstruktivis, yang melihat ‘agen’ hanya dalam konteks ‘negara’, artikel ini memosisikan aktor-aktor non-negara sebagai ‘agen’ yang posisinya dimungkinkan oleh transformasi struktur ruang di ASEAN, sehingga memungkinkan mereka melakukan negosiasi-negosiasi dengan negara.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Simon Bulmer dan Jonathan Joseph, “European Integration in Crisis? Of Supranational Integration, Hegemonic Projects and Domestic Politics”. *European Journal of International Relations* first published on November 2, 2015 as doi:10.1177/1354066115612558; Jonathan Joseph, *Hegemony: A Realist Analysis*. London and New York: Routledge; Wendt, Alexander E. 1987. “The Agent-Structure Problem in International Relations Theory”. *International Organization*.

Dalam konteks ini, konsepsi ASEAN sebagai ‘Masyarakat Kawasan’ (*regional community*) harus dipahami dalam konteks kontestasi gagasan dan wacana antar-aktor lain di kawasan. ASEAN bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya dan bukan terbentuk dari sesuatu yang sifatnya ‘niscaya’. Dengan demikian, ASEAN adalah entitas yang *politically constructed*, dinamis, dan senantiasa berubah sesuai dengan lanskap ekonomi-politik yang ada.<sup>36</sup> Pada titik inilah, pembicaraan mengenai *stakeholders* dan interaksi antar-aktor yang ada di dalamnya menjadi penting untuk menjelaskan proses regionalisme di ASEAN pasca-2003. Bagian berikutnya akan mencoba untuk membawa *theoretical framework* di atas untuk memahami dua kasus keterlibatan *stakeholders* di ASEAN.

### **Transformasi ASEAN: Dari “Organisasi Regional” ke “Masyarakat Kawasan”**

Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima pemimpin negara setingkat menteri di Asia Tenggara berkumpul di Bangkok, Thailand, untuk membicarakan sebuah rencana –pembentukan ‘organisasi’ yang bisa menjadi payung kerjasama negara-negara di wilayah tersebut. Indonesia, yang baru saja mengalami pergantian pemimpin dengan naiknya Suharto di pentas politik nasional, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah lanskap politik internasional yang dilanda ‘huru-hara’ –Rivalitas AS dan Uni Soviet yang berlangsung di berbagai tempat, Krisis Teluk Babi, ‘retaknya’ hubungan Cina dan Soviet, dan Perang Vietnam yang menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu lokus konflik utama di tingkat global. Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati satu hal: kawasan Asia Tenggara harus disterilkan dari potensi konflik melalui pembentukan satu organisasi regional –ASEAN.

Hasil dari pertemuan itu –yang di kemudian hari dikenal sebagai deklarasi Bangkok—

---

No. 41 No. 3; Colin Wight, *Agents, structures and International Relations: politics as ontology*. Cambridge University Press.

<sup>36</sup> Luqman-nul Hakim, *ASEAN*; Amitav Acharya, *Constructing A Security Community...*; Helen Nesadurai, *Domestic Politics, and Regionalism: The ASEAN Free Trade Area*. Routledge: London; Jayasuriya, Kanishka. 2004. *Asian Regional Governance: Crisis and Change*, Routledge Curzon: London.

menjadi batu loncatan penting untuk memahami apa yang saat ini kita kenal sebagai ASEAN. Kemunculan ASEAN pada dasarnya tak dapat dilepaskan dari dua konteks penting: *Pertama*, latar Perang Dingin yang sedang berada di titik puncak pada dekade 1960an-1970an. *Kedua*, ketidakstabilan kondisi regional yang saat itu membuat Asia Tenggara sangat rentan dengan konflik dan ancaman-ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa ketegangan sempat terjadi antara Indonesia dan Malaysia, polemik seputar kemerdekaan Singapura, hingga masalah di Semenanjung Indocina. Latar Perang Dingin tersebut juga diwarnai oleh Invasi AS ke Vietnam dan munculnya Pol Pot di Kamboja yang membuat kondisi Asia Tenggara sangat rawan menjadi front terbuka dari Perang Dingin. Atas dasar itu, beberapa negara yang ingin menjaga stabilitas bertemu di Bangkok pada bulan Agustus 1967, yang pada gilirannya kemudian melahirkan Deklarasi Bangkok sebagai awal mula lahirnya ASEAN.<sup>37</sup>

Dengan dua konteks tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya, ASEAN hanyalah format kerjasama yang bertujuan untuk menghindarkan kawasan Asia Tenggara dari eksekusi perang dingin. Pada saat itu, bahkan sebagaimana dicatat oleh mantan Perdana Menteri Thailand Thanat Khoman (yang menjadi tuan rumah bagi pertemuan para Menlu di tahun 1967), tidak ada sama sekali niat untuk mentransformasikan hubungan di tingkat regional tersebut ke dalam skema kerjasama yang lebih canggih. Fokus utama waktu itu adalah menghindarkan ASEAN dari kerawanannya sebagai *theatrum politicum* antara kekuatan-kekuatan politik yang ada di dunia.<sup>38</sup> Namun, setelah Perang Dingin berakhir, perkembangan regionalisme di ASEAN justru berkembang semakin pesat. Beberapa penulis berargumen bahwa pertumbuhan regionalisme Asia Tenggara yang cukup pesat ini dibawa oleh gencarnya arus globalisasi yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih intens antara aktor-aktor di tingkat regional<sup>39</sup> Sebagai contoh,

---

<sup>37</sup> Severino, Rodolfo, *ASEAN*.

<sup>38</sup> Thanat Khoman. “Conception and Evolution” dalam KS Sandhu, *The ASEAN Reader*.

<sup>39</sup> Joseph Uwe Wunderlich, *Regionalism, Globalisation and International Order*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd; James



globalisasi yang memudahkan ‘kesempatan untuk bertemu’ antara warga ASEAN telah melumerkan batas-batas negara-bangsa dan membuat proses regionalisasi menjadi mungkin.<sup>40</sup>

Isi Deklarasi Bangkok yang melahirkan ASEAN mencerminkan hal tersebut. Deklarasi Bangkok telah menyatakan bahwa “*semua basis politik luar negeri bersifat temporer dan bergantung pada kesepakatan semua negara...*”<sup>41</sup> Dari sana, terlihat bahwa ASEAN pada mulanya dibentuk sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan semua negara. Ia tidak diniatkan untuk mentransformasikan kedaulatan negara menjadi bentuk regionalisme yang kompleks. Tujuan awal ASEAN sudah dijelaskan oleh Deklarasi Bangkok, salah satunya “*...untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional... dalam hubungan antar-negara di region dan ketaatan pada prinsip Piagam PBB*”.<sup>42</sup>

Dengan demikian, ASEAN pada awalnya hanyalah pertemuan elit politik setingkat menteri luar negeri di tingkat Asia Tenggara. Tidak mengherankan jika pada awal pembentukannya di tahun 1967, desain institusional ASEAN sangat sederhana. Ia hanya berisi empat basis kelembagaan, antara lain: (1) pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri –kemudian disebut sebagai ASEAN Ministerial Meeting (AMM); (2) *Standing Committee*, komisi yang beranggotakan perwakilan resmi dari semua anggota ASEAN dan bertugas mempersiapkan hal-hal terkait pertemuan antar-Menteri Luar Negeri; (3) komisi *Ad-Hoc* atau komisi permanen yang terdiri atas para pejabat di bidang-bidang yang terkait dengan keputusan AMM; (4) sekretariat nasional di masing-masing negara.<sup>43</sup> Sedikit perluasan dilakukan dengan penandatanganan beberapa perjanjian, seperti kesepakatan membentuk

---

H. Mittelman, Rethinking the new regionalism in the context of globalization. *Global Governance*, 2, 189; Helen Nesadurai, *Domestic Politics, and Regionalism*.

<sup>40</sup> Joseph Uwe Wunderlich, *Regionalism, Globalisation and International Order*; Helen Nesadurai, *Domestic Politics, and Regionalism*.

<sup>41</sup> ASEAN Secretariat. *The ASEAN Declaration*. Signed into force in Bangkok, 8 August 1967. Jakarta: ASEAN Secretariat.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

ZOPFAN (*Zones of Peace, Freedom, and Neutrality*) di ASEAN yang disahkan pada ASEAN Ministerial Meeting tahun 1971.

Dengan desain kelembagaan ini, ASEAN di masa awal (1967) bisa dipahami sekadar sebagai pertemuan elit-elit pengambil kebijakan luar negeri. Kondisi ini bertahan hingga kira-kira 9 tahun. Pada tahun 1976, ASEAN menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (*Summit*) yang pertama kali di Bali. Pada pertemuan ini, lahir dua dokumen penting: (1) Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan (2) ASEAN Concord. Dokumen pertama memberikan dasar bagi pelebagaan kerjasama yang ada di ASEAN –terutama di bidang ekonomi— dan prinsip-prinsip yang mendasarinya (Hakim, 2011). Perjanjian ini menyepakati 6 prinsip dasar yang menjadi acuan bagi hubungan kerjasama di kawasan dan menjadi dasar bagi entitas negara lain yang ingin bergabung ke dalam ASEAN. Keenam prinsip ini antara lain: (1) *Mutual respect* atas kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan derajat, integritas teritorial, dan identitas nasional semua negara; (2) Hak semua negara untuk mempertahankan eksistensinya dari intervensi eksternal, kekerasan, atau subversi; (3) Non-interferensi dalam urusan-urusan dalam negeri negara anggota; (4) Menyikapi perbedaan atau *disputes* dengan cara-cara damai; (5) Menolak ancaman atau penggunaan kekerasan (*use of force*); dan (6) Kerjasama efektif antara masing-masing negara.<sup>44</sup>

Menariknya, keenam prinsip di atas sangat menekankan pada dua konsep: (1) kedaulatan negara; (2) non-interferensi atas kedaulatan negara lain. Dua konsep ini menunjukkan bahwa kerjasama ASEAN, secara prinsipil, dibangun di atas paradigma yang sangat *state-centrist*. Hal ini bisa dimengerti karena pada tahun 1970an, kondisi politik global masih diwarnai oleh pertarungan kekuatan-kekuatan besar, yang juga terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara (Kamboja, Laos, dan Vietnam). Pada konteks itu, kita juga bisa memahami bahwa ASEAN, dalam beberapa hal, merupakan ‘kompromi’ antara

---

<sup>44</sup> Luqman-nul Hakim, *ASEAN*; lihat juga *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Signed into force at the 1<sup>st</sup> ASEAN Summit in Bali, Indonesia.

beberapa kekuatan besar di Asia Tenggara saat itu untuk menghindari konflik lebih jauh, seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia.<sup>45</sup>

Prinsip-prinsip yang disepakati di *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) tersebut kemudian dijabarkan dalam ASEAN Concord yang juga ditandatangani pada konferensi di Bali tersebut. Dua dokumen tersebut menjadi tonggak dasar kerja sama regional di Asia Tenggara sekaligus juga membatasi norma-norma yang dijadikan pijakan dalam membangun kerja sama. Amitav Acharya mencatat bahwa TAC memberikan batasan dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan fokus pada konflik-konflik dan cara mengatasinya.<sup>46</sup> Beberapa perjanjian seperti *Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ), yang mengatur kesepakatan untuk tidak mengembangkan senjata nuklir di Asia Tenggara, ditandatangani diatas dasar perjanjian ini dan memperkuat perjanjian ZOPFAN yang telah ditandatangani sebelumnya.<sup>47</sup>

Di wilayah ekonomi, TAC juga memberikan landasan pada kerjasama intraregional yang berfokus pada pembangunan ‘benteng’ ekonomi di wilayah dalam menghadapi konstelasi ekonomi-politik global.<sup>48</sup> Setelah ASEAN Concord disahkan, negara-negara ASEAN mencanangkan tiga proyek ambisius dalam hal industrialisasi—*ASEAN Industrial Project* (1977), *ASEAN Industrial Complementary* (1981), dan *ASEAN Industrial Complementary* (1983). Tiga kerangka kerjasama ekonomi tersebut menandai karakter ‘*strong state*’ dan industrialisasi yang muncul di kawasan Asia Tenggara waktu itu.

Namun, pada tahun 1990an, kecenderungan untuk melakukan proyek-proyek industrial berteknologi tinggi tersebut bergeser ke arah perdagangan bebas. Pada tahun 1992, ASEAN mulai mengadopsi *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) untuk menghapuskan tarif perdagangan intra-kawasan. Dengan adanya *Framework* ini, negara-negara ASEAN mulai

mendiskusikan terbentuknya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang kemudian ditandatangani pada *ASEAN Economic Ministerial Meeting* di Singapura. Sebagaimana dengan komprehensif diceritakan oleh Helen Nesadurai, AFTA mencoba untuk memetakan trayektori regionalisme ekonomi baru di Asia Tenggara dengan mencanangkan liberalisasi sektor jasa dan barang via penurunan hambatan tarif hingga 0-5%, pembaharuan kerjasama-kerjasama industri yang agak terhambat di tahun 1980an, hingga percepatan integrasi dengan ekonomi global. Analisis dari Mark T. Berger memberikan perspektif lain, bahwa keterlibatan aktor-aktor finansial global seperti Bank Dunia dan IMF, terutama di sekitar periode krisis dan pasca-krisis di tahun 1997-1998, berperan dalam memuluskan skema regionalisme ekonomi baru ini.<sup>49</sup>

Adanya *shift* ini menandai proses regionalisasi baru di Asia Tenggara yang diwarnai oleh munculnya beberapa kekuatan baru seperti Amerika Serikat dan Cina. Kehadiran kepentingan Amerika Serikat di ASEAN, walau pada dasarnya sudah mengakar sejak kemunculan awal ASEAN pada tahun 1960an, termanifestasi secara lebih jelas melalui kemunculan APEC (*Asia and Pacific Economic Cooperation*). Pada tahun 1994, APEC melakukan pertemuan di Bogor yang kemudian menghasilkan Deklarasi Bogor serta menandai era baru regionalisme di Asia Tenggara dengan basis pada perdagangan bebas dan penguatan format-format kerjasama industri berbasis *export-oriented industrialization*. Di sektor keamanan, hadirnya *ASEAN Regional Forum* juga membawa perubahan dengan masuknya aktor-aktor baru dalam kancah politik kawasan, terutama Cina dan Amerika Serikat. *ASEAN Regional Forum* menjadi wadah negosiasi dalam sektor-sektor keamanan di Asia Tenggara.

Apa yang menyebabkan skema regionalisme tersebut berubah? Sebagaimana dicatat oleh

<sup>45</sup> Luqman-nul Hakim, *ASEAN*.

<sup>46</sup> Amitav Acharya, *Constructing A Security Community*...

<sup>47</sup> *Ibid.* lihat juga Rodolfo Severino, *ASEAN*....

<sup>48</sup> Luqman-nul Hakim, *ASEAN*... lihat juga KS Jomo, *Southeast Asia's Industrialization: Industrial Policy, Capabilities, and Sustainability*. Palgrave: New York.

<sup>49</sup> Mark T. Berger, “APEC and its Enemies: The Failure of the New Regionalism in the Asia-Pacific”. *Third World Quarterly*. Vol. 20, No. 5; Mark T. Berger dan Mark Beeson, “Lineages of Liberalism and Miracles of Modernisation: The World Bank, the East Asian Trajectory and the International Development Debate”. *Third World Quarterly*. Vol. 19, No. 3.

Nesadurai<sup>50</sup>, Berger<sup>51</sup>, dan Beeson<sup>52</sup>, tesis ‘globalisasi’ sebagai salah satu penjelasan mengenai berkembangnya regionalisme ASEAN ini menarik untuk dicermati. Konsekuensi dari proses globalisasi yang kian massif di Asia Tenggara, yang turut berkontribusi dalam penguatan proses regionalisasi di Asia Tenggara tersebut, adalah mulai lumernya fungsi ‘negara-bangsa’—walaupun dalam konteks ASEAN masih dipertahankan melalui prinsip non-intervensi—dan menguatnya struktur kelembagaan di tingkat regional. Proses globalisasi ini terutama dipercaya menguat sejak negara-negara Asia Tenggara mengalami krisis di tahun 1997-1998. Krisis tersebut mentransformasikan bentuk-bentuk regionalisme—terutama regionalisme ekonomi—ke dalam format *open regionalism* yang memungkinkan aktor-aktor di tingkat global masuk, seperti ASEAN Regional Forum, proposal ASEAN Plus, atau APEC.<sup>53</sup>

Penjelasan yang memungkinkan untuk melihat hal ini secara lebih jelas adalah pada proses negosiasi dan rekonstruksi kawasan pasca-krisis. Setelah periode krisis 1997-1998, beberapa opsi untuk membangun Asia Tenggara. Di sektor ekonomi, terjadi fragmentasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Negara seperti Malaysia dan Thailand menghendaki adanya intervensi negara yang lebih kuat dalam ekonomi, sementara IMF menghendaki mekanisme pasar yang bermain dalam proses rekonstruksi. Muncul pula proposal lain seperti *Asian Monetary Fund* yang digagas oleh Jepang, namun mendapatkan resistensi dari beberapa negara ASEAN.<sup>54</sup> Hal ini mengantarkan pembicaraan di antara negara Asia Tenggara untuk membangun sebuah model ‘komunitas kawasan’ sebagaimana pernah diadopsi dari Uni Eropa.

Model ‘Komunitas Kawasan’ ini pada dasarnya menguat setelah krisis Asia tahun 1997-1998 dan harus dipahami sebagai ‘sambungan’ dari proyek regionalisme yang sudah dibangun

sebelumnya, baik di wilayah politik maupun ekonomi.<sup>55</sup> Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali (2003), para pemimpin negara ASEAN sepakat untuk melanjutkan proyek liberalisasi sektor perdagangan yang sudah dibangun sejak dideklarasikannya AFTA pada awal 1990an. Di sisi lain, negara-negara ASEAN juga mulai membangun komitmen untuk mengakui HAM dan *Good Governance* dalam format regionalisme, seperti dengan mulai munculnya institusi-institusi yang melakukan promosi di wilayah HAM. Di sektor keamanan, skema *comprehensive security* mulai diperkenalkan, beserta komitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang *resilient* dan menjaga stabilitas beserta lingkungan eksternal.<sup>56</sup>

Dengan demikian, sejak tahun 2003, ASEAN mulai mengalami fase baru dalam skema regionalisme kawasannya. Hasil KTT ASEAN di Bali pada tahun 2003 (yang dikenal juga dengan Bali Concord II) mengisyaratkan ASEAN untuk membangun sebuah Komunitas Kawasan yang berpijak pada tiga pilar: ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya. Komunitas tersebut akan dideklarasikan per 31 Desember 2015. Menyusul munculnya komitmen tersebut, ASEAN juga mulai menyepakati ASEAN Charter (2007), *Blueprint* dan *Roadmap* menuju Masyarakat ASEAN (2009) serta serangkaian *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani setiap tahunnya di semua level kementerian. Skema regionalisme baru ini kemudian membawa implikasi pada semakin kompleksnya aktor di ASEAN, yang menjadi salah satu *concern* utama dari tulisan ini.

### Trayektori Regionalisme ASEAN Pasca-2003: Pelebagaan dan Menguatnya Stakeholders Non-Negara

Dengan format regionalisme baru di ASEAN tersebut, terutama melihat perkembangan yang terjadi di ASEAN sejak 2003 (Bali Concord II) dan 2007 (Pengesahan ASEAN Charter), ada beberapa kecenderungan. *Pertama*, menguatnya pelebagaan ASEAN yang ditandai dengan

<sup>50</sup> Helen Nesadurai, *Globalisation, Domestic Politics, and Regionalism...*

<sup>51</sup> Mark T. Berger, “APEC and its Enemies..”

<sup>52</sup> Mark Beeson. *Institutions of the Asia-Pacific..*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Shaun Narine, *Explaining ASEAN...*

<sup>55</sup> Luqman-nul Hakim, *ASEAN...*; lihat juga Rodolfo Severino, *ASEAN...*

<sup>56</sup> Amitav Acharya, *Constructing A Security Community...*

semakin kompleksnya proses kerjasama serta munculnya badan-badan sektoral. *Kedua*, sebagai implikasi dari pelebagaan yang kian kompleks, muncul *stakeholders* non-negara yang mulai berpartisipasi dalam proses-proses regionalisme yang ada.

### **Pelebagaan**

Pelebagaan ASEAN dalam struktur kelembagaan yang lebih kompleks di tingkat regional dimulai sejak ASEAN menggelar Konferensi Tingkat Tinggi pertamanya pada tahun 1976 (yang kemudian menghasilkan *Treaty of Amity and Cooperation* dan rangkaian konsolidasi ekonomi regional). Namun demikian, pelebagaan ini mulai intensif sejak ASEAN memiliki Sekretariat permanen untuk pertama kalinya di tahun 1992 serta secara resmi berkembang dalam format baru setelah Bali Concord II disahkan pada tahun 2003.<sup>57</sup> Dengan berpijak pada tiga pilar, ASEAN mulai membangun basis kelembagaannya dengan struktur yang cukup kompleks, dengan komposisi sebagai berikut:

1. ASEAN Summit, yakni forum tertinggi yang dihadiri oleh masing-masing Kepala Negara di ASEAN. Forum ini menghasilkan keputusan yang mengikat untuk proses regionalisme di ASEAN.
2. ASEAN Coordinating Council, yakni Dewan yang berisi masing-masing Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Dewan ini bertemu setidaknya dua kali dalam setahun.
3. ASEAN Community Councils, yakni Dewan yang berisi Menteri/Penanggung Jawab masing-masing Koordinator di tiga pilar Komunitas ASEAN: Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
4. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, yakni Komite yang berisi Menteri-Menteri yang menjadi *Focal Point* dari masing-masing Sektor di ASEAN. Komite ini juga beranggotakan *Senior Official* di Sekretariat ASEAN yang membidangi masing-masing Isu di ASEAN.

<sup>57</sup> Mark Beeson. *Institutions of the Asia-Pacific*.

5. Committee of Permanent Representatives, yakni perwakilan tetap (Duta Besar) masing-masing negara ASEAN yang berkedudukan tetap di Jakarta. CPR memfasilitasi, secara teknis, kerja-kerja yang berkaitan dengan struktur ASEAN di atasnya.
6. National Secretariats, yakni unit kerja masing-masing Kementerian yang secara langsung menangani ASEAN. Biasanya diampu di bawah masing-masing Direktorat Jenderal.
7. Committees Abroad, yaitu perwakilan tetap ASEAN di organisasi-organisasi internasional mitra.

Basis kelembagaan tersebut memperlihatkan adanya penguatan institusi dalam proses regionalisme ASEAN. Kendati demikian, institusi tersebut terlihat juga masih berpijak pada 'negara' sebagai aktor utama dalam proses kawasan, yang berpegang pada proses-proses negosiasi. Hal ini bisa dilihat sebagai sebuah transformasi bertahap dalam proses regionalisme di kawasan.

Perkembangan setelah tahun 2003 juga memperlihatkan adanya upaya untuk membangun tata aturan main di kawasan yang lebih kompleks, salah satunya melalui pengesahan ASEAN Charter pada tahun 2007 yang menjadi 'payung hukum' bersama di tingkat regional untuk mencapai proses integrasi yang lebih utuh. Bersamaan dengan itu, Sekretariat ASEAN diperkuat. Kompleksitas institusi di ASEAN ini membuat banyak sekali badan regional yang muncul di bawah komando Sekretariat ASEAN, yang secara perlahan-lahan, mulai memberikan ruang keterlibatan bagi masyarakat sipil dan memperluas jangkauan *stakeholders* bagi ASEAN

*Kedua*, seiring dengan proses pelebagaan yang mulai masif sejak Bali Concord II tersebut, kita juga menemukan fakta bahwa pintu-pintu konsultasi dengan masyarakat sipil juga mulai dibuka di beberapa wilayah, seperti HAM dan Gender.<sup>58</sup> Pintu-pintu konsultasi ini pada

<sup>58</sup> Kelly Gerard, *ASEAN's Engagement of Civil Society...* lihat juga Tan Hsien-Li, *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

mulanya terbatas, hanya pada kelompok *think-tank* ‘pelat merah’ yang diakui oleh ASEAN (seperti jaringan ASEAN-ISIS), namun mulai diperluas sejak klausul *people-oriented ASEAN* mulai muncul di ASEAN Charter Sejak 1995, ASEAN-ISIS telah menjadi *partner* konsultasi Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN untuk merumuskan sikap dan pendapat di ASEAN Ministerial Meeting.<sup>59</sup> Di tahun 2000, ASEAN-ISIS mulai berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk menggelar ASEAN People’s Assembly (APA) di Batam. Hingga tahun 2005, gelaran APA ini digelar secara rutin walaupun dengan kepesertaan yang terbatas.

Pada mulanya hanya perwakilan terbatas dari masyarakat sipil yang diundang untuk mengikuti APA.<sup>60</sup> ASEAN-ISIS mengambil peran yang cukup signifikan dalam beberapa perhelatan pertama. Namun, di tahun 2005, mulai muncul desakan dari kelompok masyarakat sipil yang lebih luas untuk menggelar forum yang lebih inklusif. Lahirlah ASEAN Civil Society Conference (ACSC) yang digelar di Malaysia pada tahun 2005 sebagai alternatif atas APA. Di kemudian hari, ACSC dan APA melebur ke dalam APF (ASEAN People’s Forum) yang menjadi perhelatan ‘alternatif’ atas penyelenggaraan KTT ASEAN.<sup>61</sup>

Klausul tersebut juga diikuti oleh beberapa mekanisme pengambilan keputusan yang, walaupun masih bergantung pada kesepakatan elit di *Summit*, juga mengakomodasi suara *stakeholders* melalui proses konsultasi. ASEAN Charter yang ditandatangani pada tahun 2007 telah menggariskan dua tahap pengambilan keputusan di ASEAN: konsultasi dan konsensus.<sup>62</sup> Kendati masih terbatas dan di beberapa negara

berlangsung secara informal, pola konsultasi membuka sedikit ruang bicara kepada aktor-aktor non-negara, terutama kelompok *think tank* dan masyarakat sipil. Di beberapa negara seperti Indonesia dan Thailand, perwakilan masyarakat sipil menemui momentum dengan keberhasilan menempatkan wakil-wakilnya di Komisi-Komisi yang baru dibentuk di ASEAN, seperti AICHR (Rafendi Djamin dari Indonesia dan Sripapha Petcharamesree dari Thailand mewakili Masyarakat Sipil) dan ACWC (Rita Kolibonso dari Indonesia) pada periode pertama (2009-2012). Kiprah Rafendi di Indonesia kemudian diteruskan pada tahun 2015 oleh Dr Dinna Wisnu, yang juga punya latar belakang sebagai akademisi dan aktivis sosial.<sup>63</sup>

*Ketiga*, Pintu konsultasi tersebut juga berjalan beriringan dengan munculnya beberapa forum masyarakat sipil tingkat regional yang lebih inklusif seperti ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum. Dengan demikian, tercipta ‘ruang partisipasi’ (walaupun terbatas) yang memungkinkan artikulasi kepentingan dilakukan di tingkat regional. Hal ini memunculkan kecenderungan meningkatnya partisipasi *stakeholders* di tingkat regional, seperti *ASEAN People’s Assembly*, *ASEAN People’s Forum*, atau beberapa kanal lain, baik yang diakui oleh ASEAN maupun yang diciptakan sendiri oleh kelompok masyarakat sipil.<sup>64</sup> Sejak pelaksanaan ACSC di tahun 2005, isu-isu yang diangkat oleh kelompok masyarakat sipil di ASEAN cenderung lebih bervariasi dan memunculkan pembicaraan di tingkat regional.

Forum-forum tersebut pada mulanya bersifat terbatas, melalui rangkaian *roundtable discussion* dan *policy forum* yang digelar oleh jaringan ASEAN-ISIS bersama Sekretariat ASEAN, namun mulai bergerak inklusif sejak *ASEAN People’s Assembly* pertama kali digelar pasca-

<sup>59</sup> David Capie, “When Does Track Two Matter? Structure, Agency and Asian Regionalism.” *Review of International Political Economy*. Vol. 17. No. 2.

<sup>60</sup> Neil Morada, APA and Track 2½ Diplomacy-The Role of the ASEAN People’s Assembly in Building an ASEAN Community. In *ASEAN 40th Anniversary Conference: “Ideas and Institutions: Building an ASEAN Community?”* (Singapore, 31 July-1 August 2007).

<sup>61</sup> *Ibid*, lihat juga Alexander C Chandra. *Civil Society in Search of an Alternative Regionalism in ASEAN*. Canada: International Institute for Sustainable Development.

<sup>62</sup> ASEAN Sekretariat. *The ASEAN charter*. Jakarta: ASEAN Sekretariat.

<sup>63</sup> Pada tahun 2012, Sripapha Petcharamesree digantikan oleh Dr Seree Nonthasoot yang berlatarbelakang *Barrister* dan ofisial pemerintah.

<sup>64</sup> Carolina Hernandez “Track Two and Regional Policy: the ASEAN ISIS in ASEAN Decision Making.” in Hadi Soesastro, Clara Joewono, and Carolina G. Hernandez. (eds). *Twenty Two Years of ASEAN ISIS: Origin, Evolution and Challenges of Track Two Diplomacy*. Jakarta: ASEAN-ISI Network; Kelly Gerard, “From the ASEAN People’s Assembly to the ASEAN Civil Society Conference...”; Alexander C Chandra. *Civil Society in Search of an Alternative Regionalism..*

krisis Asia.<sup>65</sup> Pada perkembangannya, jaringan advokasi SAPA, yang komite Asia Tenggara-nya berbasis di Manila, mulai turut mengorganisir forum masyarakat sipil melalui ASEAN Civil Society Conference di tahun 2005. Forum tersebut kemudian berkembang dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa melalui proses-proses globalisasi yang massif terjadi di Asia Tenggara pascakrisis Asia 1997-1998, mulai bermunculan artikulasi-artikulasi dari pelbagai kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang ada di ASEAN.

### ***Menguatnya Stakeholders Non-Negara***

Perkembangan pelembagaan ASEAN ini cukup menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Salah satu implikasi penting dari perkembangan pelembagaan di ASEAN tersebut adalah mulai aktifnya *stakeholders* non-negara di ASEAN, yang diwakili oleh beberapa entitas, seperti organisasi masyarakat sipil, pelaku bisnis besar, lembaga think-tank yang jejaring regionalnya mulai menguat, serta Usaha Kecil dan Menengah.<sup>66</sup> Saya berargumen bahwa perkembangan *stakeholders* non-negara di ASEAN ini dipengaruhi oleh mulai menguatnya pelembagaan di ASEAN pasca-2003. Mulai masifnya perkembangan institusi di ASEAN membuka kesempatan bagi aktor-aktor non-negara untuk terlibat. Hal ini terlihat dari, misalnya, pembentukan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan *ASEAN Commission and Women and Children* (ACWC) yang dalam prosesnya melibatkan masyarakat sipil di beberapa negara ASEAN.

Hal ini perlu dielaborasi lebih jauh. Sejak 2007, melalui ASEAN Charter, ASEAN telah menyatakan dirinya sebagai '*people-oriented ASEAN*'.<sup>67</sup> Konsekuensinya dari deklarasi sebagai organisasi *people-oriented* tersebut, mengutip

<sup>65</sup> Carolina Hernandez "Track Two and Regional Policy: the ASEAN ISIS in ASEAN Decision Making."

<sup>66</sup> Alexander C. Chandra, Indonesia's Non-State Actors in ASEAN: a New Regionalism Agenda for Southeast Asia?. *Contemporary Southeast Asia*. Lihat juga Caballero-Anthony, Mely. 2004. "Non-state regional governance mechanism for economic security: the case of the ASEAN Peoples' Assembly." *The Pacific Review*. Vol. 17. No.4.

<sup>67</sup> ASEAN Secretariat. *The ASEAN Charter*

Alan Collins. adalah dibukanya ruang bagi kelompok masyarakat sipil sebagai salah satu *stakeholders* yang keberadaannya diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan di ASEAN.<sup>68</sup> Dengan kata lain, kita bisa mengatakan ASEAN '*people-oriented*', jika ASEAN menyediakan ruang keterlibatan/deliberasi bagi *stakeholders* yang ada di dalamnya. Namun, deliberasi dan pelibatan itu justru terbatas karena artikulasi-artikulasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil di ASEAN selama ini, harus berkompromi dengan dominasi 'negara' di ASEAN, *nature* ASEAN yang elit, serta terbatasnya ruang untuk terlibat bagi *stakeholders* yang ada di ASEAN.<sup>69</sup>

Walaupun ASEAN menyediakan ruang bagi masyarakat sipil untuk terlibat, seperti melalui legalisasi *ASEAN Civil Society Conference*, hampir seluruh proses pengambilan keputusan di semua level ASEAN didominasi oleh para elit, baik di wilayah teknokratis-birokratis maupun politis. Sehingga, proses 'konsultasi' akan sangat tergantung pada masing-masing unit kementerian. Sebagai contoh, di wilayah perdagangan, proses pengambilan keputusan berlangsung pada *ASEAN Ministerial Meeting on Trade* (level Kementerian yang menjadi *Focal Point*), *Senior Official Meeting on Trade* (level birokratis di *ASEAN Secretariat*), hingga *ASEAN Ministerial Meeting* (level Kementerian Luar Negeri) dan *ASEAN Summit* (level Kepala Negara). Proses pengambilan keputusan ini dalam banyak hal tidak banyak mengikutsertakan kelompok UKM.

Hal ini tentu tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam beberapa hal, Indonesia cukup akomodatif terhadap masyarakat sipil atau aktor non-negara lain. Di negara-negara yang aparatur birokratisnya sangat kuat (seperti Laos atau Thailand pasca-kudeta), proses-proses konsultasi berlangsung secara tertutup sehingga tidak membuka banyak ruang bagi *stakeholders* yang lebih luas untuk berpartisipasi. Bahkan di negara yang mengadopsi demokrasi seperti Indonesia, proses konsultasi masih berjalan secara informal.

<sup>68</sup> Alan Collins "A People-Oriented ASEAN: a Door Ajar or Closed for Civil Society Organizations?" *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*. Vol 30. No.2.

<sup>69</sup> *Ibid*, lihat juga Kelly Gerard, *ASEAN's Engagement of Civil Society...*

Artinya, 'ruang' yang disediakan di ASEAN pada dasarnya masih punya batas-batas tertentu untuk mengakomodasi partisipasi yang lebih luas.

Dengan demikian, sejauh ini keterlibatan *stakeholders* di ASEAN masih menjadi tanda tanya besar. Ada *gap* yang muncul, yaitu menguatnya kecenderungan *stakeholders* untuk berpartisipasi di satu sisi, tetapi tidak adanya ruang untuk keterlibatan yang cukup di ASEAN. Mengingat ASEAN sudah memperbarui *blueprint*-nya dalam "Visi ASEAN 2025" yang disahkan dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur (2015), hal ini menjadi penting untuk diangkat dalam pembahasan yang lebih serius. Dalam format Masyarakat ASEAN yang dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin negara ASEAN (seperti pada Deklarasi Kuala Lumpur 2015), ASEAN tidak hanya mencita-citakan dirinya menjadi organisasi yang *people-centred* dan *people-oriented*, tetapi juga menjadi organisasi yang *resilient* dan menghargai *Good Governance* (lihat *Blueprint* Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, 2009). Konsekuensinya, akomodasi terhadap partisipasi *stakeholders* menjadi perlu dipertimbangkan dalam proses regionalisme yang sedang berlangsung.

Dengan menggunakan kerangka 'teori kritis' dan konsep Henri Lefebvre tentang produksi ruang, penting untuk kemudian melihat bangun 'ruang sosial' yang terbentuk di ASEAN dari kontestasi-kontestasi aktor yang ada di dalamnya. Konsep Lefebvre tersebut relevan untuk menjelaskan *stakeholders involvement* di ASEAN dalam proses regionalisme ASEAN. Sejarah transformasi dan proses regionalisme di ASEAN tak dapat dilepaskan dari dialektika antara 'negara' dan kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertarung untuk mendefinisikan ASEAN. Oleh karena itu, pergulatan antara 'negara' dan aktor-aktor lain yang ada didalamnya menjadi penting untuk diperhatikan secara lebih serius. Secara teoretik, tulisan ini akan menggunakan konsep keterlibatan *stakeholders* untuk memahami bagaimana ruang-ruang sosial terbentuk di ASEAN dan bagaimana *stakeholders* mencoba untuk mendefinisikan serta menegosiasikan ruang tersebut dengan 'negara' sebagai aktor utama dalam proses regionalisme di ASEAN.

Memahami Keterlibatan Stakeholders Non-Negara di ASEAN: Masyarakat Sipil dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Indonesia

Keterlibatan *stakeholders* yang ada di ASEAN adalah salah satu manifestasi dari kerangka '*people-oriented*' ASEAN yang telah disepakati dalam ASEAN Charter 2007 sebagai salah satu norma penting. Melalui kerangka teoretik yang dikembangkan di atas, studi ini mencoba untuk memotret kontestasi antara *stakeholders* dan kekuatan-kekuatan sosial di ASEAN dalam proses regionalisme yang berlangsung di dua isu utama: (1) Politik dan Keamanan serta (2) Ekonomi. Secara lebih spesifik, tulisan ini akan memahami struktur ruang seperti apa yang selama ini terbentuk dalam proses regionalism di sektor HAM dan ASEAN, wacana apa yang selama ini mereproduksi struktur ruang di ASEAN dan siapa saja *stakeholders* yang terlibat di ASEAN dan apa kepentingan atau tuntutan mereka selama ini di ASEAN.

Dengan menggunakan perspektif 'produksi ruang', keterlibatan *stakeholders* harus dipahami sebagai upaya aktor-aktor sosial yang ada di dalamnya untuk mengontestasikan kepentingan mereka di ASEAN. Untuk itu, relasi antara ASEAN sebagai 'struktur' dan aktor-aktor, baik negara maupun negara, menjadi penting untuk dilihat. Untuk keperluan itu, kajian ini mencoba untuk memetakan bagaimana *stakeholders* yang ada di ASEAN tersebut memanfaatkan ruang yang tersedia untuk mengartikulasikan kepentingannya selama ini dan sejauh mana keterlibatan *stakeholders* tersebut efektif.

Secara umum, ada tiga hal yang bisa disarikan dari dinamika transformasi 'ruang' dan keterlibatan *stakeholders* non-negara di ASEAN, terutama berkaca dari masyarakat sipil dan pelaku UKM di Indonesia. *Pertama*, terlihat bahwa sedikit demi sedikit, ASEAN mengalami perluasan struktur 'ruang', yang terlihat dari berkembangnya konsolidasi-konsolidasi institusional di tingkat kawasan. Ada dua hal yang memungkinkan perluasan struktur ruang ini, yaitu (1) perubahan paradigma negara dalam berinteraksi di kawasan, terutama dengan penekanan pada pentingnya institusi regional sebagai basis kerjasama, dan (2) mulai

munculnya jejaring institusi di ASEAN sendiri, sebagai lanjutan dari forum-forum kerjasama lintas-Kementerian di tingkat regional. Hal ini, terutama, muncul di Indonesia di masa Menlu Hassan Wirayudha, yang salah satunya termanifestasi dalam inisiatif Indonesia untuk membentuk Komisi HAM ASEAN (*ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights*) pada tahun 2007.<sup>70</sup>

*Kedua*, berkembangnya struktur ruang tersebut juga diikuti oleh munculnya jejaring antar-aktor di tingkat kawasan. Hal ini, terutama, muncul di antara berbagai NGO yang mengadvokasi isu HAM di kawasan. Di sektor UKM, jejaring muncul melalui fasilitas yang cukup kuat dari pemerintah, melalui pameran dan kerjasama-kerjasama bisnis untuk memfasilitasi UKM 'Go ASEAN', meskipun pada dasarnya jejaring tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh UKM-UKM yang ada di daerah seperti Yogyakarta. Kendati demikian, dengan munculnya beberapa inisiatif-inisiatif baru di Masyarakat Ekonomi ASEAN, terutama dengan adanya cetak biru baru Masyarakat ASEAN 2015-2025, keterlibatan UKM di ASEAN bisa menjadi lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas.

*Ketiga*, pada dasarnya, di antara kedua isu yang diteliti (HAM dan UKM), dinamika keterlibatan tersebut bervariasi dengan aktor-aktor yang juga berbeda. Di wilayah politik dan keamanan, secara lebih spesifik di sektor HAM, kontestasi terjadi antara entitas 'Masyarakat Sipil' dengan 'Negara', sementara di sektor ekonomi (UKM), yang terjadi adalah fasilitasi negara untuk memberi kesempatan UKM untuk memperluas jaringannya di ASEAN. Di wilayah ini, kontestasi justru terjadi antara 'bisnis besar' dan 'bisnis kecil' yang terjadi baik di dalam negeri maupun di tingkat regional. Pelaku UKM cenderung belum mampu memperluas pasarnya di ASEAN karena harus berhadapan dengan pemain-pemain bisnis besar dari negara ASEAN lain, plus Cina dan Jepang yang memang sudah sejak lama menjadikan ASEAN sebagai wilayah ekspansi pasar mereka.

<sup>70</sup>Donald Weatherbee, *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality*. Singapore: ISEAS.

Dinamika di dua sektor tersebut akan didiskusikan lebih jauh. Sektor HAM di ASEAN adalah salah satu sektor yang mengakomodasi *stakeholders* non-negara. Setelah tahun 2003, mulai muncul upaya dari beberapa pihak untuk membuat Komisi untuk Isu HAM (yang kemudian bernama *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) yang, pada prosesnya, memberikan ruang-ruang konsultasi dengan melibatkan masyarakat sipil. Pada praktiknya, Komisi ini juga berhasil menempatkan dua wakil masyarakat sipil didalamnya, yaitu Sripapha Petchamesree (Thailand) dan Rafendi Djamin (Indonesia) sebagai Komisioner pada tahun 2009-2012.<sup>71</sup> Kendati demikian, keterlibatan tersebut juga memiliki beberapa *gap* dan kontestasi dengan aktor-aktor lain, terutama negara. Logika regionalisme yang *state-centric* membuat keterlibatan *stakeholders* non-negara, pada titik tertentu, harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan dinamika.<sup>72</sup>

Di sisi lain, sektor UKM di ASEAN justru kurang memberikan ruang partisipasi bagi *stakeholders*. Tidak adanya basis institusional dan minimnya wadah yang diberikan kepada pelaku UKM untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun regional, berkontribusi terhadap minimnya keterlibatan mereka di ASEAN. Dalam konteks ini, UKM lebih banyak dilihat sebagai *beneficiaries* dalam kebijakan-kebijakan regional yang lebih banyak menekankan pada

<sup>71</sup>Rafendi meneruskan jabatan selama 2 periode, yaitu 2009-2012 dan 2012-2015. Pada tahun 2015, beliau digantikan oleh Dr Dinna Wisnu, akademisi dan ahli kebijakan sosial melalui mekanisme pemilihan terbuka di Kementerian Luar Negeri RI. Sementara Dr Sripapha digantikan oleh Dr Seree Nonthasoot pada tahun 2012, yang kemudian dipilih lagi oleh Pemerintah Thailand sebagai Wakil Thailand di AICHR pada tahun 2015. Dr Seree memiliki belakang ofisial, *barrister*, dan anggota Komite Pengembangan Usaha Kecil & Menengah di Thailand. Lihat Daftar Wakil masing-masing negara anggota ASEAN di AICHR, <http://aichr.org/about/aichr-representatives/>

<sup>72</sup>Lihat dua *working paper* ASEAN Studies Center UGM tahun 2014. Nandyatama, Randy W dan Atin Prabandari, "Masyarakat Sipil dan Integrasi Kawasan: Memahami Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah dalam Proses Pelembagaan Hak Asasi Manusia di ASEAN". *ASC Research Papers*. No. 1. ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.; Nandyatama, Randy W, Atin Prabandari, dan Ahmad Rizky M. Umar, 2014, "Challenging State Hegemony: ASEAN, Human Rights Organisations, and Civil Society in Indonesia". *ASC Working Paper*. No. 2. ASEAN Studies Center. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



kelompok bisnis besar. Hal ini juga terlihat di level nasional ketika tidak ada kebijakan yang benar-benar merespons dan memberdayakan UKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sejauh ini, logika regionalisme yang terlalu berat pada kepentingan bisnis besar dan menyerahkan UKM pada ‘negara’ menyebabkan lemahnya keterlibatan mereka dalam proses regionalisme yang ada. Pada titik inilah keterlibatan UKM menjadi cukup terbatas dalam proses regionalisme ekonomi yang sedang berlangsung.<sup>73</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa terdapat ketimpangan dalam partisipasi *stakeholders* non-negara di ASEAN. Dalam konteks Masyarakat Sipil HAM di ASEAN, *stakeholders* non-negara punya ruang yang cukup terbuka untuk mengartikulasikan kepentingannya di ASEAN. Persoalan yang muncul di sana adalah ruang tersebut tidak serta-merta berimplikasi pada besarnya peran mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan tetap berada pada *domain* negara, melalui pertemuan AICHR, *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM), atau KTT ASEAN (*ASEAN Summit*). Dalam konteks pelaku UKM, kendati ada ruang yang cukup terbuka, proses-proses perdagangan regional masih sangat didominasi oleh pelaku bisnis besar, beberapa di antaranya justru difasilitasi negara.<sup>74</sup> Hal ini, secara tidak langsung, justru menghambat partisipasi mereka dalam proses-proses regionalisme yang ada di negara.

## Penutup

Artikel ini mengupas keterlibatan *stakeholders* non-negara dalam proses regionalisme ASEAN, terutama setelah pembentukan ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003. Dengan menggunakan konsep ‘produksi ruang’ yang diajukan oleh

Henri Lefebvre, memperluas sekup kajiannya pada kemunculan dua aktor non-negara di ASEAN (Masyarakat Sipil di isu HAM serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia), serta mengelaborasi lebih jauh responsnya pada Masyarakat ASEAN, kajian ini berargumen bahwa perkembangan regionalisme ASEAN setelah KTT ASEAN di Bali pada tahun 2003 diwarnai oleh berkembangnya partisipasi *stakeholders* non-negara dalam proses-proses regionalisasi yang ada.

Secara lebih jauh, artikel ini mencoba mengembangkan argumentasi tersebut dengan memberikan beberapa tinjauan kritis mengenai proses pelebagaan di ASEAN dan keterlibatan *stakeholders* dalam mempertarungkan kepentingan-kepentingannya di sana. Desain institusional yang terbangun di ASEAN menentukan ruang gerak yang tersedia bagi *stakeholders* didalamnya. Desain institusional tersebut tidak terbentuk *by nature*, tetapi lahir dari proses-proses historis dan politis dalam proses negosiasi yang berlangsung sejak kelahiran ASEAN pada tahun 1967 hingga sekarang. Dalam konteks ini, pelebagaan di ASEAN membuka ‘ruang’ yang kemudian diartikulasikan oleh berbagai macam *stakeholders* di ASEAN, baik negara maupun non-negara, untuk mengontestasikan kepentingannya di ASEAN.

Oleh sebab itu, desain institusional di ASEAN harus dipahami sebagai sebuah proyek politik yang pada gilirannya membuka jalan bagi keterlibatan *stakeholders* non-negara di ASEAN. Keterlibatan *stakeholders* di ASEAN terjadi dengan cukup dinamis, dengan berbagai kontestasi antara aktor-aktor yang ada di dalamnya. Namun demikian, ada beberapa batasan yang muncul, terutama karena dinamika keterlibatan *stakeholders* di semua sektor di ASEAN tidak sama. Di wilayah HAM, dinamika berlangsung cukup ‘hangat’ antara negara dan masyarakat sipil, sementara UKM justru terpinggirkan oleh bisnis-bisnis besar, walaupun dengan sedikit fasilitasi dari pemerintah daerah. Hal ini menarik untuk diulas dalam artikel yang lebih komprehensif, karena mengimplikasikan adanya kecenderungan tertentu dari proses regionalisme ASEAN untuk lebih banyak

<sup>73</sup> Laporan riset ASEAN Studies Center UGM tahun 2014 menjelaskan hal ini. Lihat Longgina N. Bayo dan Bevaola Kusumasari. (forthcoming). “Membawa Usaha Kecil dan Menengah ke ASEAN? Kajian atas Keterlibatan *Stakeholders* dalam Proses Regionalisasi Sektor UKM di Asia Tenggara”. *ASC Research Papers* No. 2. ASEAN Studies Center UGM, Yogyakarta.

<sup>74</sup> *Ibid.* Lihat juga Shahar Hameiri dan Kanishka Jayasuriya, “Regulatory regionalism and the dynamics of territorial politics...”

mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu (seperti pelaku bisnis besar).

Tinjauan mengenai proses pelebagaan di ASEAN akan memberikan gambaran sejauh mana Komunitas ASEAN dikonsolidasikan, terutama di dua sektor yang menjadi studi kasus utama Artikel ini (HAM dan UMKM). Secara umum, gambaran tersebut telah memberikan potret mengenai dinamisnya trayektori regionalisme di ASEAN, yang tidak hanya didominasi oleh perspektif-perspektif 'realis' yang berbasis pada negara, tetapi juga aktor non-negara. Artikel ini berkontribusi untuk memperlihatkan diversitas aktor di ASEAN yang pada gilirannya memberikan kerangka acuan untuk kerangka *People-Centred* dan *People-Oriented ASEAN* sebagaimana telah diejawantahkan dalam ASEAN Charter. Artikel ini berargumen bahwa konsep *People-Centred* dan *People-Oriented ASEAN* hanya bisa berjalan jika struktur kelembagaan ASEAN dan perwakilan-perwakilan negara bisa memberikan ruang artikulasi yang lebih besar pada aktor-aktor non-negara di ASEAN. Hal ini mengimplikasikan kelompok masyarakat sipil Indonesia serta UKM untuk bisa berbenah dan pemerintah/Sekretariat ASEAN bisa mendorong kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses-proses regionalisme di Asia Tenggara guna mencapai *people-oriented ASEAN*.

Sehingga, dengan demikian, Masyarakat ASEAN 2015 tidak lagi hanya sebatas seremoni 'negara' atau 'pelaku bisnis besar'. Ke depan, keterlibatan *stakeholders* non-negara yang kian kompleks juga semestinya mampu berkontribusi untuk menjadikan ASEAN benar-benar sebagai komunitas kawasan yang '*people-centred*' dan '*people-oriented*', sebagaimana diamanahkan oleh Deklarasi Kuala Lumpur 2015.

## Referensi

### Buku dan Chapter

- Acharya, Amitav. 2000. *Constructing A Security Community in Southeast Asia*. London and New York: Routledge.
- Beeson, Mark. *Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC, and Beyond*. London and New York: Routledge.
- Chandra, Alexander C. 2009. *Civil Society in Search of an Alternative Regionalism in ASEAN*. Canada: International Institute for Sustainable Development.
- Dryzek, John S. 2000. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Elster, Jon. 1998. *Deliberative Democracy*. Vol. 1. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Emmers, Ralf. 2009. *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes In East Asia*. London: Routledge.
- Eriksen, Erik Oddvar, and John Erik Fossum (eds). 2002. *Democracy in the European Union: Integration through Deliberation?*. London: Routledge
- Freeman, R. Edward, Jeffrey S. Harrison, and Andrew C. Wicks. 2007. *Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success*. New Haven: Yale University Press.
- Gerard, Kelly. 2014. *ASEAN's Engagement of Civil Society: Regulating Dissent*. Palgrave : Basingstoke, UK.
- Gastil, John dan Peter Levine. 2005. *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass.
- Haacke, J. 2013. *ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects*. London and New York: Routledge.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*. London: Polity.
- Hernandez, Carolina G. 2006. "Track Two and Regional Policy: the ASEAN ISIS in ASEAN Decision Making." in Hadi Soesastro, Clara Joewono, and Carolina G. Hernandez. 2006. *Twenty Two Years of ASEAN ISIS: Origin, Evolution and Challenges of Track Two Diplomacy*. Jakarta: ASEAN-ISI Network.
- Hsien-Li, Tan. 2011. *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jayasuriya, Kanishka. 2004. *Asian Regional Governance: Crisis and Change*, Routledge Curzon: London.
- Jomo, KS. 2001. *Southeast Asia's Industrialization: Industrial Policy, Capabilities, and Sustainability*. Palgrave: New York.
- Joseph, Jonathan. 2003. *Hegemony: A Realist Analysis*. London and New York: Routledge.
- Khoman, Thanat. 1992. "Conception and Evolution", dalam Kernial S. Sandhu (ed.). 1992. *The ASEAN Reader*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Leifer, Michael. 1989. *ASEAN and the Security of Southeast Asia*. London and New York: Routledge.
- Lefebvre, Henri. (2003). *Henri Lefebvre: Key Writings* (edited by Stuart Elden, Elizabeth Lebas, Eleonore Kofman). London: Bloomsbury Publishing.
- Mitra, Subrata K., dan Vijay B. Singh. 2009. *When Rebels Become Stakeholders: Democracy, Agency and Social Change in India*. Delhi: Sage Publications India.
- Miller, Norman. 2008. *Environmental Politics: Stakeholders, Interests, and Policy making*. London and New York: Routledge.
- Narine, Shaun, 2002, *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*. Boulder: Lynne Rienner Publishers
- Nesadurai, Helen. 2003. *Globalization, Domestic Politics, and Regionalism: The ASEAN Free Trade Area*. Routledge: London.
- Nesadurai, Helen dan Diane Stone. 2000. "Southeast Asian Research Institutes and Regional Cooperation", dalam Diane Stone (ed). *Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development Network*. London: Routledge.
- Quayle, Linda. 2013. *Southeast Asia and the English School of International Relations: A Region-Theory Dialogue*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Rosaldo, Renato. 2007. *Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and Belonging in the Hinterlands*. University of California Press: Berkeley and Los Angeles.
- Sandhu, Kemal S. 1992. *The ASEAN Reader*. Singapore: ISEAS.
- Severino, Rodolfo. 2008. *ASEAN*, Singapore: ISEAS.
- Soesastro, Hadi, Clara Joewono, dan Carolina G. Hernandez. 2006. *22 Years of ASEAN ISIS*. Jakarta: ASEAN-ISIS Network.
- Suharko, et. al. 2015. *Usaha Kecil dan Menengah dalam Pusaran Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Yogyakarta: ASEAN Studies Center UGM.
- Wunderlich, Joseph Uwe. 2007. *Regionalism, Globalisation and International Order*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
- Wight, Colin (2006). *Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology*. Cambridge University Press.
- Weatherbee, Donald. 2013. *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality*. Singapore: Yusof Ishak Institute of Southeast Asian Studies.
- Jurnal dan Makalah**
- Ashley, Richard. 1987. "The Geopolitics of Geopolitical Space: Towards a Critical Social Theory of International Relations". *Alternatives*. No. 14.
- ASEAN Secretariat. (2008). *The ASEAN charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2009. *Blueprint of ASEAN Political Security Community*. Jakarta : ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2009. *Blueprint of ASEAN Economic Community*. Jakarta : ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. *The ASEAN Declaration*. Signed into force in Bangkok, 8 August 1967. Jakarta : ASEAN Secretariat.
- Bayo, Longgina N. dan Bevaola Kusumasari. (forthcoming). "Membawa Usaha Kecil dan Menengah ke ASEAN? Kajian atas Keterlibatan Stakeholders dalam Proses Regionalisasi Sektor UKM di Asia Tenggara". *ASC Research Papers* No. 2. ASEAN Studies Center UGM, Yogyakarta.
- Berger, Mark T. 1999. "APEC and its Enemies: The Failure of the New Regionalism in the Asia-Pacific". *Third World Quarterly*. Vol. 20. No. 5.
- Berger, Mark T dan Mark Beeson. 1999. "Lineages of Liberalism and Miracles of Modernisation: The World Bank, the East Asian Trajectory and the International Development Debate". *Third World Quarterly*. Vol. 19. No. 3.
- Bulmer, S., & Joseph, J. 2016. "European Integration in Crisis? Of Supranational Integration, Hegemonic Projects and Domestic Politics". *European Journal of International Relations*.
- Caballero-Anthony, Mely. 2004. "Non-state regional governance mechanism for economic security: the case of the ASEAN Peoples' Assembly." *The Pacific Review*. Vol. 17. No.4.
- Capie, David. 2010. "When Does Track Two Matter? Structure, Agency and Asian Regionalism." *Review of International Political Economy*. Vol. 17. No. 2.
- Campbell, David E. 2013. "Social Networks and Political Participation." *Annual Review of Political Science*. No. 16.
- Chandra, Alexander C. 2004. Indonesia's Non-State Actors in ASEAN: a New Regionalism Agenda for Southeast Asia?. *Contemporary Southeast Asia*.
- Collins, Alan. 2008. "A People-Oriented ASEAN: a Door Ajar or Closed for Civil Society Organizations?." *Contemporary Southeast*

- Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*. Vol 30. No.2.
- Crane, Andrew, Dirk Matten, dan Jeremy Moon. 2004. "Stakeholders as Citizens? Rethinking Rights, Participation, and Democracy". *Journal of Business Ethics*. Vol. 53. No.1-2.
- Fermia, Joseph. 2008. "Gramsci, Epistemology, and International Relations Theory". *Paper presented at the Political Studies Association Conference*. Swansea.
- Freeman, R. Edward. 1994. "The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions." *Business Ethics Quarterly* Vol. 4. No.4.
- Frooman, Jeff. 1999. "Stakeholder Influence Strategies." *Academy of Management Review*. Vol. 24. No. 2.
- Gerard, Kelly. 2013. "From the ASEAN People's Assembly to the ASEAN Civil Society Conference: the Boundaries of Civil Society Advocacy." *Contemporary Politics*. Vol. 19. No. 4.
- Hameiri, Shahar dan Kanishka Jayasuriya. 2011. "Regulatory regionalism and the dynamics of territorial politics: The case of the Asia-Pacific region." *Political Studies*. Vol. 59. No.1.
- Hobson, John M. 1998. "The Historical Sociology of The State and The State of Historical Sociology in International Relations." *Review of International Political Economy*. Vol. 5. No.2.
- Hurrell, Andrew. (2007). One World? Many Worlds? The Place of Regions in the Study of International Society. *International Affairs*, 83(1): 127-146.
- Katsumata, Hiro. (2003). Reconstruction of diplomatic norms in Southeast Asia: The case for strict adherence to the "ASEAN Way". *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 25(1): 104-121.
- Matten, Dirk dan Andrew Crane. 2005. "What is Stakeholder Democracy? Perspectives and Issues". *Business Ethics A European Review*. Vol. 14. No. 1.
- Mittelman, James H. (1996). Rethinking the new regionalism in the context of globalization. *Global Governance*, 2, 189.
- Mouffe, Chantal. 1999. "Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?." *Social Research*.
- , 2009. "Democracy in a Multipolar World." *Millennium-Journal of International Studies*. Vol. 37. No. 3.
- Morada, N. M. (2007). APA and Track 2½ Diplomacy- The Role of the ASEAN People's Assembly in Building an ASEAN Community. Presented at ASEAN 40th Anniversary Conference, *Ideas and Institutions: Building an ASEAN Community?* Singapore, 31 July-1 August 2007.
- Moravcsik, Andrew. 2004. "Is There a 'Democratic Deficit' in World Politics? A Framework for Analysis". *Government and Opposition*. Vol. 39. No. 2.
- Nandyatama, Randy W dan Atin Prabandari, (forthcoming) "Masyarakat Sipil dan Integrasi Kawasan: Memahami Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah dalam Proses Pelembagaan Hak Asasi Manusia di ASEAN". *ASC Research Papers*. No. 1. ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nandyatama, Randy W, Atin Prabandari, dan Ahmad Rizky M. Umar, 2014, "Challenging State Hegemony: ASEAN, Human Rights Organisations, and Civil Society in Indonesia". *ASC Working Paper*. No. 2. ASEAN Studies Center. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Petri, Peter A. 2012. Michael G. Plummer, and Fan Zhai. "ASEAN economic community: A general equilibrium analysis." *Asian Economic Journal*. Vol. 26. No.2
- Rüland, Jurgen. 2014. "The Limits of Democratizing Interest Representation: ASEAN's Regional Corporatism and Normative Challenges." *European Journal of International Relations*. No. 20. No.1.
- Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Signed into force at the 1<sup>st</sup> ASEAN Summit in Bali, Indonesia.

#### Tesis

- Hakim, Luqman-nul. 2011. ASEAN: Konstruksi Regionalisme Ekonomi Asia Tenggara. Tesis Pascasarjana. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.